

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **4.1 Analisa pada Deskripsi Data Penelitian**

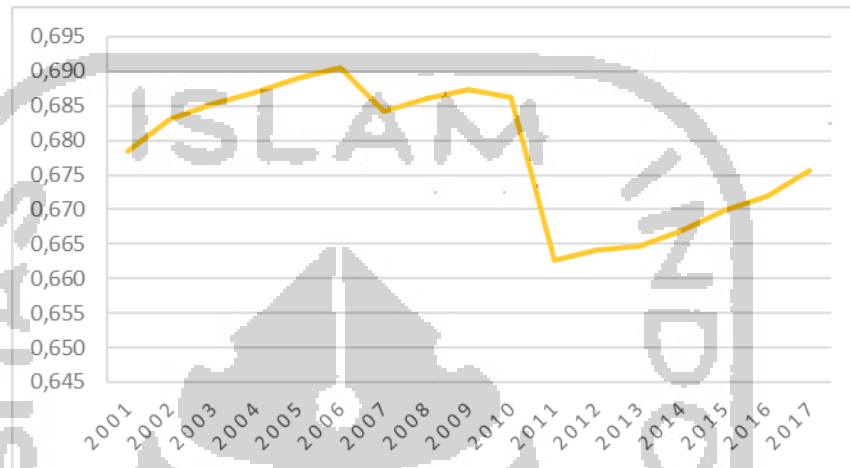
Pada analisis ini akan menjelaskan hubungan tingkat ketimpangan pembangunan ini melalui variabel terikat Indeks Williamson pada beberapa variabel bebas di Pulau Jawa menggunakan data panel. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari setiap provinsi di di Pulau Jawa selama 18 tahun dan menggabungkan beberapa data tersebut menjadi suatu data panel sehingga dapat di uji tingkat pengaruhnya. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini antara lain: PDRB setiap provinsinya, rasio penduduk kota, dan pengeluaran pemerintah. Pengaruh variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat yaitu Indeks Williamson.

Dalam analisis ini akan memberikan pemahaman tentang hubungan dari hasil-hasil data yang diperoleh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

##### **4.1.1 Analisa Deskriptif Data**

Penjelasan setiap variabel dimulai dari Indeks Williamson yang ada pada Pulau Jawa. Indeks Williamson menjelaskan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada pada tiap provinsi di Pulau Jawa. Dalam penelitian dijelaskan bahwa terdapat tingkat ketimpangan yang terjadi di Pulau Jawa selama tahun 2001-

2017. Penjelasan tingkat ketimpangan pembangunan yang ada di Pulau Jawa tersebut dijelaskan melalui Gambar 4.1.



Sumber: BPS diolah

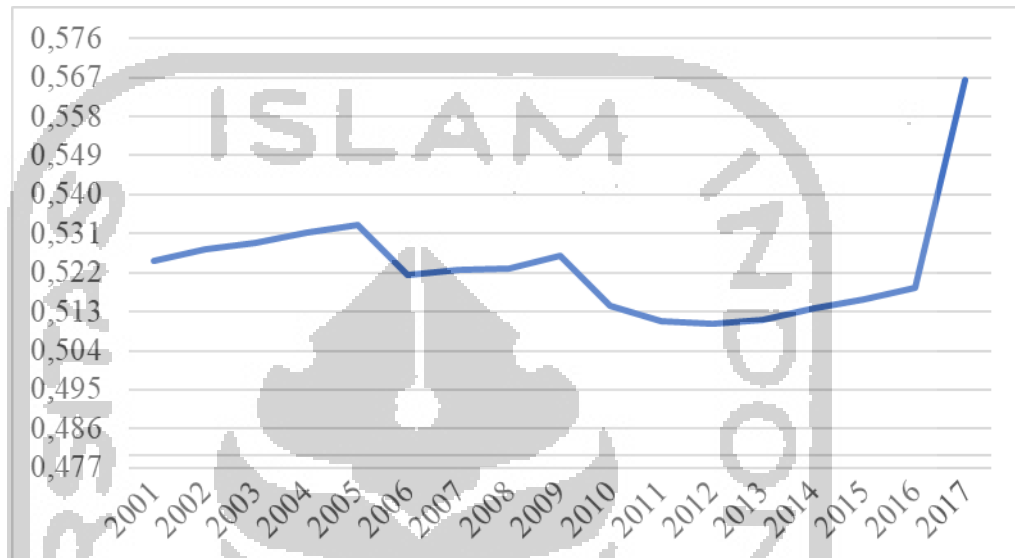
**Gambar 4.1**

### **Indeks Williamson Pulau Jawa**

Gambar 4.1 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Pada Gambar 4.1 rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Pulau Jawa berada pada titik 0,678. Angka tersebut terhitung tinggi apabila mendekati satu. Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Jawa berada pada tahun 2006. Gambar 4.1 menunjukkan pada tahun 2006 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,691.

Ketimpangan pembangunan ekonomi menurun tajam pada tahun 2011. Diketahui bahwa pada tahun 2011 menjadi titik terendah tingkat ketimpangan ekonomi yang ada di Pulau Jawa tepatnya pada titik 0,663. Hal ini sekaligus menjadikan tren positif dalam pemerataan yang ada pada Pulau Jawa. Namun baiknya

tren tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga ketimpangan pun merangkak naik secara terus menerus.



Sumber : BPS diolah Excel

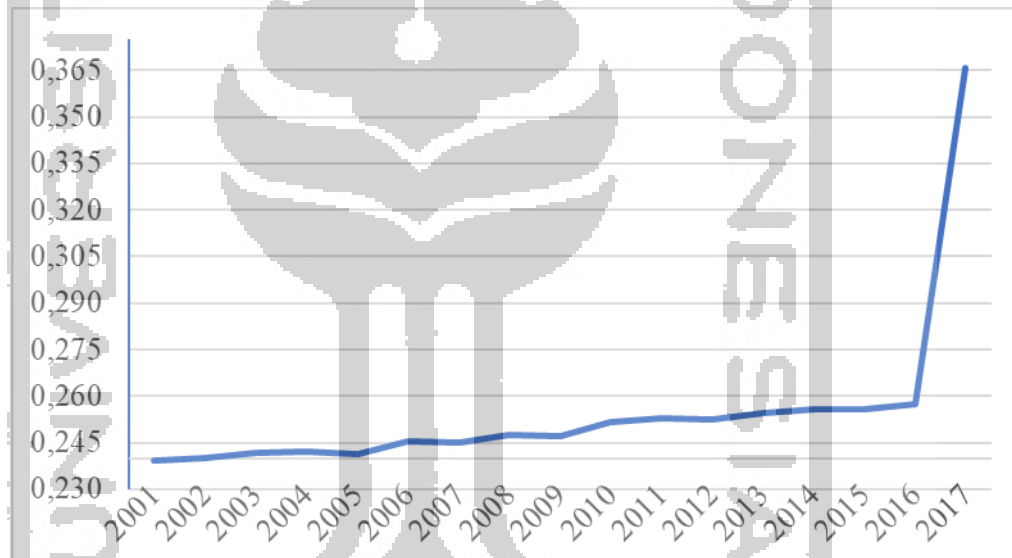
**Gambar 4.2**

### **Indeks Williamson Jakarta**

Gambar 4.2 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pada Gambar 4.2 rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi DKI Jakarta berada pada titik 0,523. Angka tersebut terhitung tinggi apabila mendekati satu.

Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi DKI Jakarta berada pada tahun 2017. Gambar 4.2 menunjukkan pada tahun 2017 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,566. Pada DKI Jakarta titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi pada tahun 2012 yaitu pada titik 0,510.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2001 mengalami kenaikan ketimpangan hingga 2005. Namun ketimpangan pembangunan ekonomi membaik setelah tahun 2005 hingga ketitik terendah pada tahun 2012. Perbaikan ekonomi tersebut tidak bertahan lama. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta kembali memburuk setelahnya. Memburuknya perekonomian tersebut ditandai dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2017.



Sumber: BPS diolah Excel

**Gambar 4.3**

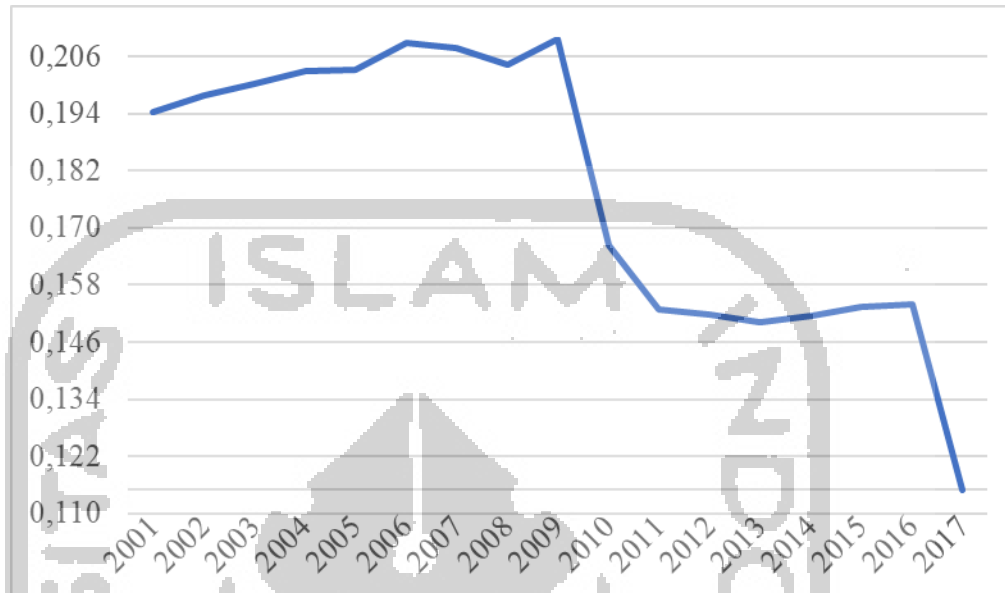
### Indeks Williamson Jawa Barat

Gambar 4.3 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Jawa Barat berada pada titik

0,255. Angka tersebut terhitung rendah apabila dilihat dari nilai Indeks Williamsonnya.

Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat berada pada tahun 2017. Gambar 4.3 menunjukkan pada tahun 2017 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,366. Pada Provinsi Jawa Barat titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi pada tahun 2001 yaitu pada titik 0,239.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat yang fluktuatif dan mempunyai kecenderungan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat selama tahun penelitian, tingkat Indeks Williamson yang menunjukkan ketimpangan ekonomi selalu meningkat setiap tahunnya. Namun ketimpangan pembangunan ekonomi stagnan pada tahun 2003 hingga 2004 pada titik 0,242, 2008 hingga 2009 pada titik 0,247 dan 2014 hingga 2015 pada titik 0,56. Hal tersebut tidak membuat perekonomian Provinsi Jawa Barat membaik. Ditandai dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2017, menunjukkan pengelolaan pembangunan ekonomi yang masih belum baik di provinsi tersebut.



Sumber : BPS diolah Excel

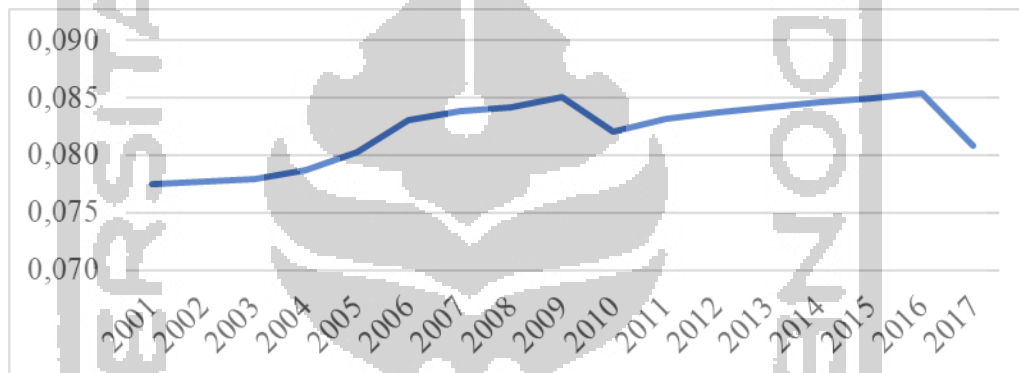
**Gambar 4.4**

#### **Indeks Williamson Jawa Tengah**

Gambar 4.4 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pada Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Jawa Tengah berada pada titik 0,178. Angka tersebut terhitung rendah apabila dilihat dari nilai Indeks Williamsonnya. Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat berada pada tahun 2009. Gambar 4.3 menunjukkan pada tahun 2009 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,210. Pada Provinsi Jawa Tengah titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi pada tahun 2017 yaitu pada titik 0,110.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2001 hingga tahun 2009

menunjukkan tingkat ketimpangan yang terus melebar. Namun ketimpangan pembangunan ekonomi membaik setelah tahun 2009 perekonomian membaik kembali hingga tahun 2013. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan ekonomi sempat memburuk dengan naiknya indeks ketimpangan dari tahun 2014 hingga 2016 ke titik 0,154. Selanjutnya, ketimpangan dalam pembangunan ekonomi kembali membaik pada tahun 2017.



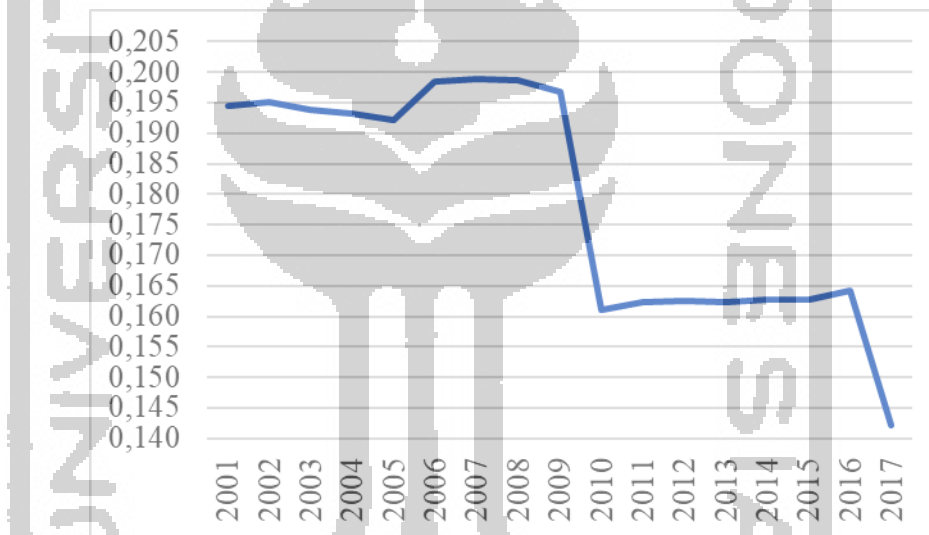
Sumber : BPS diolah Excel

**Gambar 4.5**

**Indeks Williamson Yogyakarta**

Gambar 4.5 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta. Pada Gambar 4.5 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Yogyakarta berada pada titik 0,082. Angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi rendah karena mendekati angka 0. Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta berada pada tahun 2009 yaitu pada titik 0,085 dan pada tahun 2002 menjadi titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi yaitu pada titik 0,178.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi Yogyakarta cenderung memburuk. Palsalnya, hal tersebut ditandai dengan kenaikan nilai ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Nilai ketimpangan pembangunan ekonomi yang membaik pada tahun 2010 turun ke titik 0,0820. Namun hal tersebut tidak bertahan lama. Nilai ketimpangan pembangunan ekonomi kembali meningkat sampai tahun 2016 dan berhenti ada titik 0,0854. Selanjutnya, nilai Indeks Williamson kembali membaik pada tahun 2017 kembali ke titik 0,0809.



Sumber : BPS diolah Excel

**Gambar 4.6**

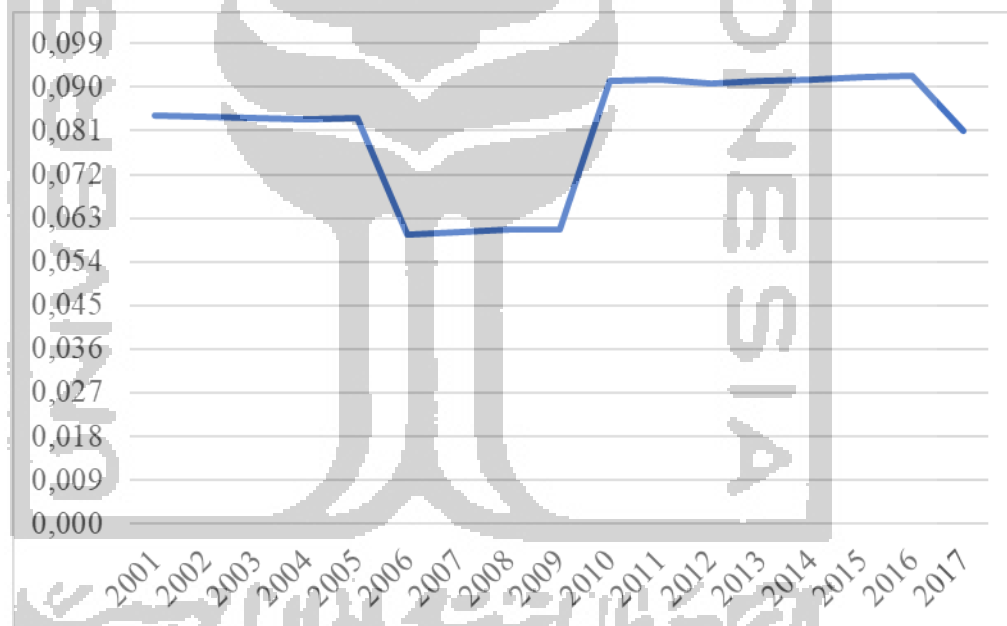
### **Indeks Williamson Jawa Timur**

Gambar 4.6 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada Gambar 4.6 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Jawa Timur berada pada titik 0,179. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Jawa Timur tergolong rendah. Tingkat tertinggi ketimpangan



pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur berada pada tahun 2005 yaitu pada titik 0,199. Pada tahun 2017 menjadi titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi yaitu pada titik 0,142.

Ketimpangan pembangunan yang ada pada Provinsi Jawa Timur cenderung membaik dari tahun 2001 hingga 2017. Walau pada tahun 2008 ketimpangan sempat memburuk hingga titik 0,199 ketimpangan terus membaik pada tahun berikutnya hingga tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan ekonomi dilakukan secara merata di Provinsi Jawa Timur.



Sumber : BPS diolah Excel

**Gambar 4.7**

### **Indeks Williamson Banten**

Pada Gambar 4.7 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Banten. Gambar 4.7 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Banten berada pada titik

0,081. Pada awal tahun observasi, Angka Indeks Williamson tercatat cukup stagnan pada tahun 2001 hingga 2005 pada titik 0,084. Angka tersebut mengalami penurunan setelahnya pada tahun 2006. Pada tahun 2006 tingkat ketimpangan pembangunan yang ada pada Provinsi Banten turun ke titik 0,060.

Tingkat Indeks Williamson kembali naik setelah tahun 2009. Angka mencatat tingkat Indeks Williamson naik ke titik 0,092 dan menjadikan nilai tersebut menjadi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi tertinggi. Nilai Indeks Williamson kembali stagnan hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, Indeks Williamson kembali turun ke titik 0,081. Tercatat, rata-rata Indeks Williamson yang ada pada Provinsi Banten berada pada titik 0,081.

**Tabel 4.1**

**Analisis Statistik Deskriptif**

	GOV	PDRB	URBAN_RATIO	WILLIAMSON
Mean	10155557	6.45E+08	0.60912	0.217435
Median	5281492	6.54E+08	0.522	0.192761
Maximum	51066081	1.64E+09	1	0.566445
Minimum	329286.2	43586466	0.404	0.059559
Std. Dev.	11087701	4.30E+08	0.196875	0.153294
Observations	102	102	102	102

Sumber: Data diolah Eviews 9

Pada tabel data 4.1 menunjukkan jumlah observasi pada wilayah Pulau Jawa sebanyak 102 observasi dengan rincian terdapat 6 provinsi di Pulau Jawa dan tahun penelitian selama 2001-2017. Pada analisis diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat indeks ketimpangan (*Williamson Index*) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,217 dengan nilai tertinggi sebesar 0,566 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan nilai terendah sebesar 0,193 di provinsi Jawa Timur pada tahun 2005.
2. Tingkat pengeluaran pemerintah memiliki rata-rata sebesar 10.155.557 juta rupiah dengan nilai tertinggi anggaran sebesar 51.066.081 juta rupiah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 dan tingkat anggaran paling rendah sebesar 32.928,6 juta rupiah di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2001.
3. PDRB memiliki rata-rata nilai sebesar 6.45E+08 juta rupiah dengan nilai tertinggi pada angka 1.64E+09 juta rupiah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan nilai terendah 43.586.466 juta rupiah di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2001.
4. Tingkat rasio penduduk kota memiliki rata-rata sebesar 0,609 dengan nilai tertinggi 1 pada rasionya di Provinsi DKI Jakarta dan nilai minimum sebesar 0,404 di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rasio penduduk kota tertinggi karena memiliki status sebagai Daerah Khusus Ibukota (Undang-Undang No. 10 Tahun 1964) dan menjadikan keseluruhan bagian dari provinsinya bagian dari kota.

## 4.2 Hasil dan Pembahasan Analisa

### 4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Pada data (panel), terdapat tiga model yang digunakan dalam menentukan hasil regresi yang akan dianalisis nanti. *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* ini dipilih dengan cara melakukan beberapa tes pada setiap model. Adapun dalam proses pemilihan model menggunakan dua uji yang terlebih dahulu digunakan. Kedua uji tersebut menggunakan Uji Hausman dan Uji Chow. Hasil dari uji pemilihan model sebagai berikut:

#### 1. *Chow Test*

Uji Chow dilakukan dalam menentukan model regresi yang akan digunakan dalam metode analisa selanjutnya. Uji Chow digunakan untuk menentukan model lebih baik menggunakan *Common Effect Model* atau menggunakan *Fixed Effect Model*. Berikut hipotesis dari Uji Chow antara lain:

- a.  $H_0$ : Estimasi model lebih baik menggunakan *Common Effect Model*
- b.  $H_1$ : Estimasi model lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*

Dalam melakukan pemilihan uji, dapat menggunakan *Common Effect Model* ataupun *Fixed Effect Model* dapat melakukan perbandingan antara nilai probabilitas dengan nilai  $\alpha$  ( $\alpha=0,05$ ). Apabila probabilitas dari Uji Chow menunjukkan nilai yang signifikan ( $\leq 0,05$ ), maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Apabila

nilai probabilitas tidak signifikan ( $\geq 0,05$ ) maka model yang lebih baik digunakan adalah *Common Effect Model*.

**Tabel 4.2**

**Hasil Chow Test**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	580.401951	(5,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	354.154534	5	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9

Nilai Probabilitas dari *Cross-section F* menggunakan Eviews 9 menunjukkan hasil probabilitas yang kurang dari  $\alpha(\alpha=0,05)$  sebesar 0.0000 sehingga probabilitas menolak  $H_0$  dan gagal menolak  $H_1$ . Maka Uji chow menunjukkan model yang lebih baik digunakan ialah *Fixed Effect Model*.

## 2. Hausman Test

Uji Hausman dilakukan untuk memilih estimasi model yang lebih baik di antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berikut hipotesis dari Uji Hausman yaitu:

- a.  $H_0$ : Estimasi model lebih baik menggunakan *Random Effect Model*
- b.  $H_1$ : Estimasi model lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*

Pada Uji Hausman dapat diketahui bahwa nilai probabilitas yang kurang dari  $\alpha(\alpha=0,05)$  maka model estimasi yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Namun apabila nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha(\alpha=0,05)$  maka model estimasi yang lebih baik adalah *Random Effect Model*.

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	473.881352	3	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9

Hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dimiliki pada *cross-section random* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ( $\leq 5\%$ ) maka dapat diperoleh hasil  $H_0$  ditolak dan gagal menolak  $H_1$ . Oleh karena itu, model yang digunakan dalam metode regresi ialah *Fixed Effect Model*.

3. Estimasi *Fixed Effect Model*

Pada model estimasi *Fixed Effect* dapat diperhatikan bahwa setiap observasi pada unit *cross section* memiliki nilai intersep yang berbeda dalam waktu yang sama. Pada model ini koefisien regresi (*slope*) dapat diasumsikan tetap baik antar variabel maupun antar waktunya. Adapun hasil dari regresi *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Hasil Regresi Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.250097	13.43777	0.0000
GOV	3.78E-06	7.039971	0.0000
PDRB	-1.79E-07	-8.21807	0.0000
URBAN_RATIO	0.089775	2.676413	0.0088
R-squared	0.992675		
Adjusted R-squared	0.992038		
F-statistic	1558.489		
Prob(F-statistic)	0.000		

Sumber: Data diolah Eviews 9

$$V_{wit} = \beta_0 + \beta_1 GOV_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 UR_{it} + U_{it}$$

$$V_{wit} = 0.252332 + 3.78^{E-06} GOV_{it} + -1.79^{E-07} PDRB_{2it} + 0.089775 UR_{it} + U_{it}$$

- di mana:
- Y = Index williamson
  - $\beta_0$  = Koefisien intersep
  - $\beta_1$  = Koefisien pengaruh *Government Expenditure*
  - $\beta_2$  = Koefisien pengaruh PDRB
  - $\beta_3$  = Koefisien pengaruh *Urban Ratio*
  - U = Variabel pengganggu
  - i = Provinsi di Pulau Jawa (6 provinsi)
  - t = Tahun Observasi

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji t

Pada variabel Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) dapat diketahui bahwa nilai koefisiennya sebesar 3,78E-06 di mana memiliki nilai

probabilitas 0,0000 ( $\leq 0,05$ ) menunjukkan secara statistik bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh ketimpangan pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa.

Variabel PDRB menunjukkan bahwa nilai pada koefisien tersebut sebesar  $-1,79E-07$  dengan nilai probabilitas 0,0000 ( $\leq 0,05$ ) menunjukkan bahwa secara statistik PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa.

Pengaruh rasio penduduk kota terhadap ketimpangan pada *Fixed Effect Model* diketahui memiliki koefisien regresi sebesar 0,089963 dan memiliki probabilitas sebesar 0,0000 ( $\leq 0,05$ ) maka dapat dinyatakan bahwa rasio penduduk kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

#### **4.3.2 Uji F**

Uji F atau Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Pada hasil regresi model *Fixed Effect* di peroleh probabilitas *F-statistic* sebesar 0,0000 ( $\leq 0,05$ ) maka PDRB, pengeluaran pemerintah dan rasio penduduk kota secara keseluruhan signifikan dan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan.

#### **4.3.3 Koefisien Determinasi (*R-squared*)**

Koefisien determinasi (*R-squared*) merupakan koefisien di mana koefisien tersebut menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen seperti: PDRB, pengeluaran pemerintah dan rasio penduduk kota berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan tabel uji



determinasi menunjukkan koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,992675 (99,26%) maka variabel PDRB, pengeluaran pemerintah dan rasio penduduk kota memiliki pengaruh pada ketimpangan ekonomi sebesar 99,26%. Sedangkan 0,74% dijelaskan variabel-variabel lain di luar model yang memiliki pengaruh pada ketimpangan pembangunan.

#### **4.4 Pembahasan**

Pada bagian interpretasi ini akan dijelaskan hubungan antar variabel-variabel independen (PDRB, pengeluaran pemerintah, rasio penduduk kota) terhadap dengan variabel dependen yaitu variabel ketimpangan (*Index Williamson*). Pengeluaran Pemerintah (*Government expenditure*) memiliki nilai koefisien sebesar 3,78E-06 dan bernilai positif berpengaruh pada ketimpangan pembangunan. Hal tersebut berarti apabila pemerintah menambah jumlah pengeluarannya 1 miliar rupiah dari APBD, maka ketimpangan pembangunan akan naik sebesar 3,78E-06. Mailindra (2017) menjelaskan bahwa variasi belanja semakin meningkat yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan ketimpangan pembangunan bertambah dan sebaliknya. Selanjutnya, penelitian tersebut menjelaskan bahwa, pengeluaran rutin pemerintah daerah yang lebih tinggi dibandingkan anggaran pembangunan menjadikan pengeluaran pemerintah dalam sektor pembangunan ekonomi menjadi tidak merata. Hal ini dapat dijelaskan dalam anggaran belanja daerah yang masih belum matang dalam sektor pembangunan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai koefisien sebesar -1,79E-07 dan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil

penelitian tersebut menggambarkan apabila pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa meningkat 1 miliar rupiah maka ketimpangan pembangunan akan turun sebesar  $1,79E-07$ . Ginting (2015) menjelaskan bahwa peningkatan PDRB dengan menggali potensi daerah dapat dilakukan sebagai penggerak sumber ekonomi daerah sehingga pembangunan dapat merata.

Hal ini sama dengan apa yang disebutkan Vu (2016) bahwa pembangunan yang bersifat tidak merata ataupun terpusat dapat meningkatkan ketimpangan antar daerah atau provinsi. Terbukti dengan tingginya potensi ataupun perputaran ekonomi disuatu wilayah tanpa mengimbangnya dengan pemerataan dapat menyebabkan ketimpangan di wilayah tersebut. Namun berbeda dengan hal tersebut, Nugroho (2011) menjelaskan pelebaran tingkat ketimpangan dapat terjadi secara terus-menerus dengan ada peningkatan yang terjadi pada PDRB juga. Hal tersebut menggambarkan peran PDRB pada proses dan hasilnya dapat berpengaruh pada tingkat ketimpangan suatu wilayah.

Sedangkan *Urban Ratio* memiliki nilai koefisien sebesar 0,089963 dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal tersebut memiliki arti bahwa jika rasio kota bertambah 1% maka ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa naik 0.089963. Vu (2016) menjelaskan bahwa terpusatnya ekonomi pada suatu distrik menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi dan berdampak pada daerah lain yang ekonominya terus melambat. Dengan tingkat rasio perkotaan yang semakin tinggi dapat menggerus kegiatan ekonomi wilayah yang ada disekitar kawasan perkotaan. Begitu pula yang terjadi pada pulau Jawa, dengan tingkat rasio penduduk

kota terhitung tinggi, maka tingkat ketimpangan yang ada pada Pulau Jawa terus mengalami kenaikan.

Sun (2018) menjelaskan hal yang sama. Daerah pedesaan dan perkotaan yang mengalami perpadatan penduduk secara cepat menciptakan ketimpangan. Tak hanya dari kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik, tingkat urban ratio dinilai menjadikan ekonomi yang terpusat pada satu wilayah saja dan menjadikan wilayah pedesaan sebagai daerah yang tertinggal. Penilaian tersebut dapat dijelaskan pada tingkat pembaharuan teknologi yang terus meningkat dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Hal tersebut menjadikan daerah pedesaan jauh tertinggal dibandingkan daerah perkotaan. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.